

# **PENGUATAN PENERAPAN SPM DI KALIMANTAN UTARA**

## **Konsistensi Tata Kelola untuk Layanan Dasar yang Merata**

**JUNI 2026**





Komitmen untuk menghadirkan layanan dasar yang setara bagi setiap warga semakin nyata dirasakan di Kalimantan Utara. Di tengah tantangan geografis antarwilayah yang berjauhan dan sebaran penduduk yang tidak merata, upaya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terus diprioritaskan. Sebagai provinsi muda di beranda negara, semangat untuk menjangkau yang tak terjangkau menjadi energi utama dalam pembangunan.

Dalam semangat inilah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran negara tidak boleh terhalang oleh jarak, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjamin hak konstitusional masyarakat.

SPM adalah mandat negara untuk menjamin hak-hak dasar warga. Melalui kerangka regulasi nasional Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM mengatur sebagai upaya negara mengatur enam urusan layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bagi Kalimantan Utara, tantangan tersebut justru menjadi titik tolak untuk membangun tata kelola yang kuat dan konsisten.

Menurut data 2024 Triwulan IV (per 13 Januari 2025) Setditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kemendagri, Provinsi Kalimantan Utara mencatat capaian penerapan SPM yang secara umum tinggi dan terjaga sepanjang 2020–2024. Dari sisi pembiayaan di Provinsi Kalimantan Utara, alokasi anggaran SPM menurun dari sekitar Rp393 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp142 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi seiring dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dan penguatan belanja yang lebih selektif. Meski demikian, capaian SPM tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya fokus prioritas serta efisiensi dalam pengelolaan belanja layanan dasar di daerah. Hal ini tidak lepas dari proses pendampingan dan kolaborasi erat bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

# SPM sebagai Instrumen Tata Kelola Pembangunan

Di balik layanan dasar yang mulai dirasakan masyarakat, ada tata kelola yang terus dirawat. Sejak 2021–2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menata ulang perannya dalam penerapan SPM. Tak hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pemampu (enabler), menghubungkan Lima perangkat daerah pengampu, menjaga ritme koordinasi, dan memastikan setiap proses berjalan konsisten dari perencanaan hingga pelaporan.

SPM di Kalimantan Utara berhasil dijalankan berkat konsistensi yang dibangun sejak awal. Meskipun relatif muda sebagai daerah otonom, Kalimantan Utara tak tertinggal dalam tata kelola SPM. Sejak fase awal, kolaborasi lintas perangkat daerah telah menjadi fondasi utama dalam penerapannya.

Pendekatan ini membuahkan hasil nyata. Dalam dua periode penilaian nasional, Kalimantan Utara berhasil meraih penghargaan nasional atas kinerja penerapan SPM: pertama pada tahun 2023 (hasil penilaian 2022), dan kembali meraih penghargaan pada 2025 (hasil penilaian 2024).

Capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Keberhasilan SPM di Kaltara ditopang oleh kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah pengampu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial.



“  
*SPM ini adalah mandatory spending. Artinya, ia harus dikelola secara serius, dari tahap perencanaan sampai implementasi.*  
”

Taufik Hidayat,  
Kepala Biro Pembinaan dan Otonomi Daerah  
Kalimantan Utara

Biro Tata Pemerintahan mengambil peran aktif sebagai penggerak koordinasi lintas perangkat daerah. Pendekatan “jemput bola” diterapkan secara konsisten, mengundang, mengawal, dan memastikan setiap pengampu SPM bergerak seirama.

Sejak 2024, ritme kerja diperkuat melalui evaluasi triwulanan. Setiap capaian dan kendala dibahas sejak awal tahun, jauh sebelum proses pengisian aplikasi pelaporan SPM. Koordinasi tidak berhenti di level teknis, tetapi juga dikonsolidasikan hingga ke Kepala Daerah, sehingga komitmen tidak terputus di tengah jalan.

“Walaupun Kalimantan Utara adalah provinsi baru, kami harus berdiri sejajar dengan provinsi lain, terutama dalam penerapan SPM. Komitmen tersebut dijaga mulai dari pimpinan daerah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, hingga admin dan pelaksana teknis di lapangan,” ungkap Taufik.

Tingginya capaian SPM di Kalimantan Utara, bahkan saat anggaran berfluktuasi dari tahun ke tahun, menegaskan bahwa konsistensi tata kelola menjadi fondasi utama keberlanjutan layanan dasar. Sebagai respons terhadap tantangan anggaran dan kebutuhan pengawalan yang lebih sistematis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga membentuk The SPM Team dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. Tim ini berfungsi sebagai mekanisme pengawalan SPM yang terstruktur, bukan ad hoc. Pembentukan tim ini menunjukkan kedewasaan tata kelola di Kalimantan Utara untuk menjawab tantangan fiskal dengan penguatan sistem, bukan sekadar penyesuaian jangka pendek.



# SPM Pendidikan: Dari Kebijakan ke Praktik Baik di Sekolah

Di sektor pendidikan, SPM tidak berhenti pada standar dokumen. Ia diterjemahkan ke dalam keputusan sehari-hari di lingkungan belajar. Mulai dari bagaimana guru dipersiapkan, bagaimana ruang kelas diakses, hingga bagaimana anak berkebutuhan khusus memperoleh dukungan yang layak. Dalam dua tahun terakhir, perubahan mulai terasa, dari ketiadaan guru pendamping khusus, menuju sistem yang perlahan dibangun melalui pelatihan, regulasi, dan kolaborasi lintas wilayah.

Terutama dalam layanan pendidikan inklusif, SPM diterjemahkan secara konkret. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memfokuskan upaya pada tiga aspek utama:

1. Penguatan sumber daya manusia,
2. Pemenuhan sarana dan prasarana,
3. Peningkatan kapasitas guru pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Merujuk pada regulasi terbaru terkait akomodasi yang layak, Dinas Pendidikan mendorong penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, perbaikan akses dan fasilitas pembelajaran, serta pelatihan asesmen bagi guru untuk mendukung kesiapan peserta didik sejak awal masuk sekolah.



Jika sebelumnya layanan pendidikan inklusif berjalan dengan keterbatasan, bahkan tanpa guru pendamping khusus, kini pengadaan guru pendamping mulai dilakukan. Sarana dan prasarana yang berpihak pada anak berkebutuhan khusus juga ditingkatkan, mulai dari aksesibilitas bangunan hingga media pembelajaran yang aman dan ramah disabilitas.

Keterbatasan jumlah guru pendamping di provinsi baru seperti Kaltara diatasi melalui pendekatan adaptif. Guru-guru reguler yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas diberikan pelatihan dan bimbingan teknis, bekerja sama dengan akademisi dan unit layanan disabilitas dari daerah lain yang telah lebih dulu mengembangkan pendidikan inklusif.

# Sekolah Luar Biasa (SLB), Wajah Inklusivitas SPM

Implementasi SPM di bidang pendidikan semakin terasa nyata di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di SLB Tanjung Selor, peningkatan layanan dilakukan secara bertahap namun konsisten. Transportasi antar-jemput siswa diperjuangkan untuk memastikan akses belajar, mengingat banyak siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kegiatan vokasi dan pengembangan bakat juga diperkuat, dengan dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kolaborasi dengan pihak swasta.

Dalam dua tahun terakhir, penguatan kapasitas guru SLB dilakukan secara sistematis melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SLB se-Kalimantan Utara menjadi ruang berbagi praktik dan peningkatan kompetensi guru, dengan fokus pada berbagai ragam kebutuhan peserta didik.

Dukungan pemerintah daerah turut memperkuat layanan. Penambahan tenaga pendidik, pengangkatan guru melalui skema PPPK, serta rencana peningkatan sarana kesehatan sekolah menjadi bagian dari agenda keberlanjutan. Layanan yang sudah ada masih harus diperkuat untuk menyasar kekurangan guru dan fasilitas dasar seperti toilet disabilitas, yang memerlukan dukungan lintas sektor dan kebijakan lanjutan.



# SPM Layanan Sosial: Menjaga Martabat Lansia

Di sektor sosial, penerapan SPM tercermin dalam layanan bagi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, Kalimantan Utara. Panti ini menampung lansia dari berbagai kabupaten/kota, bahkan lintas provinsi, sebagai bagian dari kerja sama antar daerah. Layanan dasar saat ini fokus dijalankan mencakup pemenuhan kebutuhan makan, sandang, serta layanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas.

Dalam dua tahun terakhir, kualitas layanan terus ditingkatkan. Kehadiran tenaga kesehatan seperti perawat dan ahli gizi memperkuat aspek pelayanan kesehatan. Sarana pendukung, seperti aula untuk aktivitas fisik lansia dan fasilitas transportasi untuk rujukan medis, juga diperbaiki secara bertahap.

Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah. Wisma lansia yang tersedia merupakan bangunan lama yang memerlukan rehabilitasi agar sesuai dengan kebutuhan lansia dengan kondisi kesehatan khusus. Dalam hal ini, dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menjadi kunci, baik melalui asistensi anggaran maupun fasilitasi perencanaan.

“  
**Lansia di sini jarang mengeluh. Tapi kami ingin panti ini terus maju,**  
”

**Tasya,**  
Pengelola Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu  
Kalimantan Utara



Tasya, pengelola Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, Kalimantan Utara, seraya berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan mitra pembangunan, dapat semakin diperkuat.

Bagi para lansia, layanan dasar bukan sekadar indikator kinerja. Ia hadir dalam rutinitas harian dan berinteraksi dengan sesama penghuni panti. “Pagi subuh sholat, kemudian bersih-bersih di wisma depan, biar sehat. Kadang olahraga, jalan,” ujar Sri Wahyuni, salah satu lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu.

# The SPM Team: Merajut Konsistensi, Menjaga Keberlanjutan

Meski telah menunjukkan kinerja yang solid, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyadari bahwa tantangan ke depan tidak semakin ringan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama Kalimantan Utara dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Merespons hal tersebut, strategi kolaborasi terus dikembangkan, salah satunya melalui pembentukan The SPM Team. Tim ini memegang mandat krusial: mengawal implementasi SPM secara lebih terstruktur, memastikan setiap langkah yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata. Penguatan The SPM Team adalah kerja kolaboratif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan turut difasilitasi oleh SKALA melalui pendampingan teknis untuk memperkuat praktik tata kelola adaptif dan fokus pada implementasi yang aplikatif.

Ke depan, Kalimantan Utara berupaya memperkuat pendekatan keunggulan komparatif antar kabupaten/kota. Setiap daerah didorong untuk mengembangkan indikator SPM unggulan sesuai dengan kekuatannya masing-masing, misalnya pendidikan di satu daerah, kesehatan di daerah lain, sehingga praktik baik dapat saling dipelajari dan direplikasi. Pendekatan ini dinilai realistis dan strategis, memungkinkan “virus kebaikan” menyebar antarwilayah tanpa menuntut semua daerah unggul di semua indikator sekaligus.

“

***Unggul tapi tidak mengurangi yang lain, sehingga nanti saling mengisi. SPM ini kalau tiap kabupaten/kota kalau punya keunggulan masing-masing itu akan menyebar dan tertular virus kebaikan SPM itu dari masing-masing kabupaten kota untuk mempelajari dari yang lain.***

”

Taufik Hidayat,  
Kepala Biro Pembinaan dan Otonomi Daerah  
Kalimantan Utara

Pengalaman Kalimantan Utara menunjukkan bahwa konsistensi tata kelola, komitmen lintas sektor, dan koordinasi yang terjaga mampu mengubah SPM dari kewajiban administratif menjadi instrumen pembangunan yang bermakna. Pendidikan inklusif, layanan bagi anak berkebutuhan khusus, dan perlindungan lansia menjadi bukti bahwa SPM dapat menjangkau seluruh siklus kehidupan.

Ke depan, tantangan pemerataan mutu layanan masih perlu dijawab. Yakni memastikan mutu layanan dasar benar-benar merata hingga wilayah terluar dan komunitas yang paling rentan. Kaltara masih berhadapan dengan hambatan jarak dan konektivitas, kesenjangan kapasitas layanan antarwilayah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di titik-titik layanan. Di saat yang sama, konsistensi data dan tindak lanjut lintas sektor perlu terus diperkuat agar koordinasi tidak berhenti di forum, tetapi berujung pada perbaikan layanan yang nyata dan terukur di lapangan.

Namun, fondasi yang telah dibangun memberikan pijakan kuat untuk melangkah lebih jauh. Dengan menjaga konsistensi, memperkuat kapasitas, dan membuka ruang kolaborasi, SPM di Kalimantan Utara terus diarahkan sebagai janji negara yang benar-benar dipenuhi, bukan hanya tercatat dalam laporan, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“

***Penghargaan bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah memastikan layanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat,***

Taufik Hidayat,  
Kepala Biro Pembinaan dan Otonomi Daerah  
Kalimantan Utara

”

Kepastian layanan dasar tercermin dari konsistensi yang dijalankan, mulai dari bagaimana komitmen dijaga lintas sektor, bagaimana koordinasi tidak berhenti di forum, dan bagaimana layanan dasar terus diperbaiki meski tantangan belum usai. Di sanalah SPM menjadi lebih dari standar, ia menjadi janji negara yang dijalankan dan dipenuhi.







**SKALA**

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.



**IFC Tower 2, Level 17**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



[skala.or.id](https://skala.or.id)



<https://s.id/Channel-SKALA>